

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebut “SAKIP”

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kominfo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dalam hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kominfo Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. Gambaran Umum Dinas

Kondisi atau gambaran umum daerah masa kini khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu;

1. Kebutuhan sistem dalam layanan publik di Kota Pekalongan
2. Kebutuhan integrasi sistem agar kecepatan dan keakuratan data dalam layanan publik terpenuhi.

3. Kebutuhan keamanan dan persandian dalam informasi dan komunikasi.
4. Kebutuhan teknis layanan jaringan dalam komunikasi informasi
5. Kebutuhan satu data se Indonesia
6. Kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik
7. Kebutuhan peningkatan kualitas desiminasi informasi yang menjadi tuntunan masyarakat dan pemersatu bangsa

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika disingkat Dinkominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan Dinkominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain :

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang informasi dan komunikasi publik;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang infrastruktur dan statistik ;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang aplikasi dan persandian ;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
7. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi standart operasional prosedur (SOP) dari/atau Standart Pelayanan (SP) ;
8. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN

D. Isu Strategis

1. Perlu peningkatan tata kelola ekosistem eGovernment dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
2. Perumusan dan penerapan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik belum optimal
3. memasuki era digitalisasi perlu support jaringan Batik.Net
4. Kebutuhan pengetahuan TIK
5. Belum adanya database satudata Indonesia
6. Kebutuhan akan keamanan informasi baik dari sisi keamanan aplikasi maupun keamanan informasi
7. Telaahan capaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun terakhir Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Pekalongan serta mendukung tercapainya Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan.
8. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan dalam Rencana Strategis 2016-2021 merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
9. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.

Landasan Hukum

LKjIP Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

RPJMD yang telah ditetapkan melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, mengalami perubahan disesuaikan dengan RPJMD Kota Pekalongan sekaligus menyederhanakan indikator kinerja.

Penyusunan Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kominfo Kota Pekalongan dengan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan tersebut dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah :
“TERWUJUDNYA KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN NILAI-NILAI RELIGIUSITAS”.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan;

2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan;
- 5) **Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas;** dan
- 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengemb

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinam-bungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 10 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Kominfo. Kota Pekalongan sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Kominfo Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kemampuan Komunitas dalam peman-faatan TI sebagai salah satu Upaya Pemberdayaan		Persentase TI yang dikembang kan dan dimanfaatkan oleh Komunitas	100%	100%	100%
		Meningkatn ya kualitas layanan Publik	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	50,00	78.95	100.00
		Meningkatn ya Kemampuan Komunitas dalam Pemanfaata n Teknologi Informasi Berbasis Komunitas	Cakupan Komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi	20	23	30

B. Indikator Kinerja Utama.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama

Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	2. Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	Persen		$\frac{\sum \text{OPD dengan Nilai KIP kategori "Baik"}}{\sum \text{OPD di Kota PEkalongan}} \times 100\%$	APBD
15	Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Infomrasi Berbasis Komunitas	1. Cakupan Komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi	KElom pok		$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang memanfaatkan TI}}{\sum \text{Target Kelompok masyarakat yang memanfaatkan TI}} \times 100\%$	APBD

c. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Kominfo II Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
Dinas Kominfo Kota Pekalongan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	83,0
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi KIP	Indeks	950,0
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Cakupan OPD dengan Nilai KIP kategori “Cukup Informatif/Baik”	Indeks	100,00
4	Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	23,00

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	811.316.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	663.192.000
3. Program peningkatan peng.sistem pelaporan cap.kin&k	Rp.	36.000.000
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	Rp.	31.640.000
5. Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Rp.	1.824.349.000
6. ProgramOptimalisasi Penguatan Teknologi informasi	Rp.	883.069.000
7. Program Pengelolaan Deseminasi Informasi Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp	3.529.680.000
8. Program Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat dan penguatan KIP	Rp.	529.128.000
9. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp.	106.360.000
10. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan	Rp.	57.567.000
Jumlah	Rp.	8.491.301.000

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Perubahan RPJMD 2016-2021 sekaligus menerapkan cascading supaya terarah dan runtut sesuai jabatan diawali dengan tujuan dan sasaran (yang dimiliki oleh Kepala atau Eselon II) kemudian dijabarkan runtut sesuai dalam program (oleh Kepala Bidang atau Eselon III) dan dijabarkan ke kegiatan (oleh PPTK atau Eselon IV dst) semua permusuhan harus dijabarkan dan dipasang target dan laporan capaian dilaporkan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya

menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2016-2021.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan antara lain :

B. Rekomendasi Bappeda Kota Pekalongan

1. Dalam menyusun LKJIP dan Renstra disarankan untuk membuat tabel panjang sebagai dasar penyusunan target dan laporan kinerja OPD.
2. Tabel panjang berisi Tujuan Sasaran Indikator dan Target Pencapaian Misi RPJMD harus valid dan bisa menjadi pedoman penyusunan LKJIP selanjutnya.
3. Setiap Tujuan, Sasaran dan Program sesuai dengan urutan hirarki tidak boleh menyebar harus mengkrucut sesuai kapasitas jabatan.
4. Setiap Tujuan, Sasaran dan Program ada Indikator masing-masing yang tidak boleh sama karena sesuai urutan indikator, tujuan mencakup bisa lebih dari satu sasaran begitu pula indikator sasaran bisa lebih dari satu indikator program sehingga membentuk kerucut
5. Tujuan dan Sasaran merupakan indikator Kepala OPD
6. Program (Outcome) merupakan indikator Bidang dan Sekretaris
7. Kegiatan (Output) merupakan indikator PPTK.

C. Rekomendasi Inspektorat Kota Pekalongan

1. Dalam penyusunan renja tahun anggaran 2020 untuk sesuai / selaras dengan Renstra Perangkat Daerah (penyajian program dan kegiatan)
2. Dalam penyusunan Renja sesuai/selaras dengan RKPD tahun 2020 terkait adanya
 - ketidaksesuaian target capaian kinerja pada Renja Tahun 2020 dengan RKPD tahun 2020
 - ketidaksesuaian target capaian kinerja pada Renja Tahun 2020 dengan RKPD tahun 2020
 - ketidaksesuaian target capaian kinerja pada Renja Tahun 2020 dengan RKPD tahun 2020
3. melengkapi form lokasi kegiatan pada Renja 2020 yang belum diisi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kominfo Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Kominfo.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan
Tahun 2016

NO	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan WaliKota Pekalongan Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kominfo Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kominfo **Kota Pekalongan**
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase Teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas	persen	100	100	Tercapai	

Analisis penghitungannya :
jumlah aplikasi yg dibangun dan masih aktif dan ditambah 2 pengembangan aplikasi baru di TW-2 (corona) dan TW-3 (aplikasi sitwasbesar), sehingga capaian 12/12 x 100% = 100%

Berikut rincian aplikasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan komunitas dari tahun 2017 s/d 2019 sebagai berikut :

Tahun	Target	Capaian	Satuan	Keterangan
2017	100%	100%	aplikasi	1. explore.pekalongankota.go.id 2. ppid.pekalongankota.go.id 3. e-kliping.pekalongankota.go.id 4. e-suratonline.pekalongankota.go.id 5. wadulo.pekalongankota.go.id
2018	100%	100%	aplikasi	1. explore.pekalongankota.go.id 2. ppid.pekalongankota.go.id 3. e-kliping.pekalongankota.go.id 4. jawabanhoax.pekalongankota.go.id 5. wadulo.pekalongankota.go.id 6. tourism.pekalongankota.go.id 7. pkk.pekalongankota.go.id
2019	100%	83.33%	aplikasi	1. explore.pekalongankota.go.id 2. ppid.pekalongankota.go.id 3. e-kliping.pekalongankota.go.id 4. jawabanhoax.pekalongankota.go.id 5. wadulo.pekalongankota.go.id 6. tourism.pekalongankota.go.id 7. pkk.pekalongankota.go.id 8. pekalonganmall.go.id 9. pasarbatik.pekalongankota.go.id 10. internetaman.pekalongankota.go.id 11. smartcity.pekalongankota.go.id 12. sipekan.pekalongankota.go.id
2020	100%	100%	aplikasi	1. explore.pekalongankota.go.id 2. ppid.pekalongankota.go.id 3. e-kliping.pekalongankota.go.id 4. tourism.pekalongankota.go.id 5. pkk.pekalongankota.go.id 6. pekalonganmall.go.id 7. pasarbatik.pekalongankota.go.id 8. internetaman.pekalongankota.go.id 9. smartcity.pekalongankota.go.id 10. sipekan.pekalongankota.go.id 11. corona.pekalongankota.go.id 12. sitawasbesar.pekalongankota.go.id

Dalam penentuan teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas tahun 2020 tercapai 12 aplikasi dengan target 12 aplikasi

A.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan.

Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian Indikator kinerja Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan tahun 2020, sebagai berikut

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja sasaran
Dinas Kominfo **Kota Pekalongan**
Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target / Perubahan Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	persen	78.95	93.55	Tercapai	
2.	Cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	23	23	Tercapai	

Indikator

Dalam melaksanakan indikator Kinerja sasaran Dinas Kominfo Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 menuju pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran. Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Startegis Dinas Kominfo Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kota Pekalongan
Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target / Perubahan Target	Real isasi	Capaian				
						Th. 2020	Nas	Pro	Kab. Btg	Kab. Pkl
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	63.64	100	100	-	-	-	-
2	Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis komunitas	Cakupan komunitas yg berdaya dalam memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	23	23	100	-	-	-	-

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	
2	Sesuai Target	2 sasaran
3	Kurang Target	
4	Belum ada target	

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari 2 (dua) kinerja Sasaran diatas, pencapaian target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 2	1			1	100		
2	Misi 5	1			1	100		

Dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 2		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target		
B.	Misi 5		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

1. Perencanaan yang akan datang.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun yang sedang dilaksanakan
3. Kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya
4. target akhir renstra.
5. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
6. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongantahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1
8. Meningkatnya kualitas layanan publik
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6.
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya layanan informasi publik berbasis teknologi
informasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Th. 2020		%	Th 2019	%
			Target	Real		Real	
2.	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	Persen	78.95	91.00	100	96.77	100

1. Daftar Nilai KIP OPD tiga tahun terakhir (2017 s/d 2020)

No	OPD	Th. 2017		Th. 2018		Th. 2019		Th. 2020
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Capaian
1	Dindik	600	600	700	850	800	905	1000
2	Dinkes	600	616	800	866	850	920	800
3	Dinarpus	600	700	850	639	900	790	765
4	Dindagkop UKM	600	341	700	492	800	700	550
5	Dindukcapil	600	591	800	841	850	720	715
6	Dinkominfo	600	719	850	882	900	967	1000
7	Dinparbud	600	417	700	667	800	810	675
8	Dinperinaker	600	576	700	826	800	800	815
9	Dinperkim	600	710	850	460	900	750	575
10	Dinperpa	600	154	700	304	800	625	530
11	Dinsos P2KB	600	293	700	443	800	900	835
12	Dishub	600	574	700	824	800	850	595
13	DKP	600	606	700	856	800	830	1000
14	DLH	600	197	700	347	800	625	745
15	DPMPPA	600	420	700	670	800	775	850
16	DPMPTSP	600	714	850	860	900	910	1000
17	DPUPR	600	320	700	470	800	930	850
18	Bappeda	600	356	800	506	850	780	900
19	BKD	600	310	700	460	800	840	650
20	BKPPD	600	337	700	487	800	875	920
21	BPBD	600	303	700	453	800	650	870
22	Inspektorat	600	326	700	476	800	670	675
23	RSUD Bendan	600	620	700	870	800	940	1000
24	Kesbangpol	600	270	700	420	800	630	630
25	Satpol PP	600	181	700	331	800	950	1000
26	Setwan	600	286	700	436	800	600	970
27	Kec. Pkl. Barat	600	636	800	686	850	710	730
28	Kec. Pkl. Timur	600	272	800	422	850	645	665
29	Kec. Pkl. Utara	600	410	800	640	850	730	615
30	Kec. Pkl Selatan	600	565	800	815	850	740	660
31	Setda	600	326	700	476	800	575	732
	Organisasi	600	0	700	0	800	0	

Perekonomian	600	0	700	0	800	0	
Tata Pemerintah	600	0	700	0	800	0	
RT dan Perlengk	600	0	700	0	800	0	
Kesra	600	0	700	0	800	0	
Umum	600	0	700	0	800	0	
BPJ Dalbang	600	0	800	0	850	0	
Hukum	600	0	700	0	800	0	
Humas	600	0	700	0	800	0	

2. Program dan kegiatan yang mendukung (anggaran dalam DPA)

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	94.400.000,-	90.088.014,-
2		Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPAS	36.700.000,-	27.600.000,-
3		Pengelolaan Call Center 112	398.028.000,-	369.424.750,-
		Jumlah	529.128.000,-	487.112.764,-

3. Faktor Pendukung dalam mencapai tujuan :

1. Dukungan Komitmen Walikota dalam kelangsungan pelaksanaan KIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
2. Adanya koordinasi antar OPD
3. Aktivasi Admin dalam pengelolaan data OPD berjalan lancar

4. Faktor Penghambat dalam mencapai tujuan

1. setiap ada perubahan data untuk selalu mengingatkan anggota Tim PPID Pembantu.
2. Permohonan yang diminta oleh pemohon terkadang belum tersedia sehingga membutuhkan koordinasi ke OPD untuk segera mencukupi

Tabel 3.7.

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

Sasaran **meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi**

No	Sasaran		Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
8	Meningkatnya kualitas layanan publik	2	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (Informatif)	Persen	78.95	93.55	NA	Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat dan penguatan KIP	529.128.000,00	487.112.764,00	92.00
			Capaian					Total	529.128.000,00	487.112.764,00	92.00
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 8.00 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 92.00 %											

Sasaran Strategis 2

15. Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas

Tabel 3.6.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Komunitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Th. 2020		%	Th 2019	%
			Target	Real		Real	
15.	1. Cakupan Komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan Teknologi Informasi	Kelompok	23	23	100	21	105

1. Data jumlah komunitas yang mampu menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan dengan baik pada tiga tahun terakhir

Tahun	Target	Capaian	Satuan	Keterangan
2017	10	9	komunitas	1. Himpaudi 2. MI Pringlangu 3. SMKIN 4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim 5. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI) 6. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax) 7. Relawan TIK 8. Open Source Software 9. Dewan TIK
2018	15	15	Komunitas	1. Himpaudi 2. MI Pringlangu 3. SMKIN 4. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim 5. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI) 6. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax) 7. Relawan TIK 8. Open Source Software 9. Kelurahan 10. Kecamatan 11. Dewan TIK 12. Puskomas 13. MGMP TIK 14. Animasi 15. Blogger
2019	20	21	komunitas	1. Himpaudi 2. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim 3. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI) 4. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax) 5. Relawan TIK 6. Open Source Software 7. Dewan TIK 8. MGMP TIK 9. Animator 10. Blogger 11. Fotografer 12. Film 13. Catur Pilar 14. RW Net 15. BKR

				16. PKK 17. Karangtaruna 18. Lppar 19. Pecinta Domain 20. Formaci (Forum Masyarakat Anti Hoax Cinta NKRI) 21. RAPI
2020	23	23	komunitas	1. Himpaudi 2. Ikatan Wanita Pengusaha Muslim 3. Ikatan Wanita Digital Indonesia (IWODI) 4. Arah (Assosiasi Rakyat Anti Hoax) 5. Relawan TIK 6. Open Source Software 7. Dewan TIK 8. MGMP Multimedia 9. Animator 10. Blogger 11. Fotografer 12. Film 13. Catur Pilar 14. RW Net 15. BKR 16. PKK 17. Karangtaruna 18. Lppar 19. Pecinta Domain/pecinta internet hebat 20. Formaci (Forum Masyarakat Anti Hoax Cinta NKRI) 21. RAPI 22. Pengelola web sekolah 23. komunitas pendidik yang dilatih

2. Program dan kegiatan yang mendukung (anggaran dalam DPA)

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Pemanfaatan teknologi informasi	Pengembangan konten kreatif digital berbasis komunitas	Rp. 30.000.000,-	Rp. 26.342.000,-
2		Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 79.444.000,-	Rp. 66.159.400,-
2		Fasilitasi Dewan TIK	Rp. 25.000.000,-	Rp. 19.866.700,-
3		Pemberdayaan komunitas dan Relawan TIK	Rp. 6.510.000,-	Rp. 5.269.700,-
4		Jumlah	Rp.140.954.000,-	Rp.117.637.800,

3. Faktor Pendukung dalam mencapai tujuan :

1. Komunitas yang terbentuk karena mendukung pencegahan covid 19
2. Komunitas didukung oleh Pemerintah Kota dibekali pelatihan IT dengan emmenuhi protokol kesehatan

4. Faktor Penghambat dalam mencapai tujuan

1. Adanya wabah Covid'19 dilarang berkerumun yang bersifat mengumpulkan orang
2. Adanya pengurangan anggaran melalui refocussing yang secara bertahap dari beberapa kegiatan yang sifatnya tidak mendesak guna mendukung penanganan covid 19.

Tabel 3.9.

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja

Sasaran **Meningkatnya** kemampuan Komunitas dalam pemanfaatan Teknologi Infomrasi Berbasis Komunitas

No	Sasaran		Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
8	Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis komunitas	2	Cakupan komunitas yang berdaya dalam pemanfaatan teknologi informasi	Kelompok	23	23	100	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informatif	140.954.000	117.637.800	83.45
			Capaian					Total	140.954.000	117.637.800	83.45
TINGKAT EFISIENSI 16.55 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 83.45 %											

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kominfo Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPPA Dinas kominfo Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.8.491.301.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.037.718.733,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94.66%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 453.582.267,-. mencapai 94.66%

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Kominfo Kota Pekalongan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Kominfo Kota Pekalongan
Tahun 2019

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,			487.112.764	92.46
1	Melebihi/Melampaui Target				
2	Sesuai Target	1	100		
3	Tidak Mencapai Target				
B.	Misi 2,			117.637.800	83.45
1	Melebihi/Melampaui Target				
2	Sesuai Target	1	100		
3	Tidak Mencapai Target				

PRESTASI DAN PENGHARAPAN

Dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan termasuk kategori “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dalam SK Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPTS/K1-JTG/XII/2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dalam pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020.

Untuk Kota Pekalongan	: 91.00
Kabupaten Batang	: 97.10
Kabupaten Pekalongan	: 88.70

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kominfo Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang BAIK. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam tahun 2020 Dinas kominfo Kota Pekalongan menetapkan sebanyak dua(2) Indikator Kinerja Renstra sesuai RPJMD Perubahan Nomor 9 Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	capain
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	Indeks	85,0	83.59
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi KIP	Indeks	950,0	950
3	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Cakupan OPD dengan Nilai KIP kategori “Cukup Informatif/Baik”	Indeks	42.11	91.00
4	Meningkatnya pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	83.33	100

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak empat indikator kinerja tersebut, secara umum rata-rata capaian sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kominfo Kota Pekalongan dalam mencapai target kinerja yang ingin dicapai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.496.301.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.037.718.733,- atau dengan serapan dana APBDP mencapai 94,66%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 453.582.267,-. mencapai 5,44%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kominfo Kota Pekalongan.

Pekalongan, 31 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PEKALONGAN



YOS ROSYIDI, SIP Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 196605161986031007



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Kota Pekalongan

City Of Crafts | Designated UNESCO
and Folk Art | Creative City in 2014

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2020